

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gerakan BEM UMY dalam pandangan mahasiswa

Gerakan mahasiswa di UMY yang selama ini berjalan memang fokus dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Namun jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswanya, hanya segelintir orang yang ikut berpartisipasi pada gerakan mahasiswa ini. Hanya pengurus-pengurus BEM dan beberapa mahasiswa yang tertarik dalam gerakan. Jadi secara jumlah sebenarnya tidak begitu banyak, tetapi seringkali aksi-aksi yang dilakukan bergabung dengan peserta aksi BEM lain baik yang ada di DIY maupun dari luar DIY atau bahkan ormas-ormas penentang kebijakan Jokowi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, memang tidak banyak mahasiswa yang peduli dengan gerakan mahasiswa dalam mengkritisi pemerintahan yang berkuasa. Umumnya mereka hanya kuliah dan tidak peduli dengan masalah pemerintahan yang ada. Fokus cepat lulus dan mengejar nilai sebaik-baiknya menjadi pilihan mahasiswa kebanyakan. Oleh karena itu dari kuesioner yang disebar dalam penelitian ini, penilaian mahasiswa terhadap demonstrasi dan gerakan mahasiswa yang dilakukan BEM UMY masih sangat apatis atau terkesan tidak tahu dan cenderung untuk mencari aman saja.

Meskipun demikian, respon-respon yang diberikan oleh mahasiswa dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai potret penilaian mereka terhadap gerakan mahasiswa UMY selama ini. Hal pertama yang ditanyakan adalah

tentang adanya kemungkinan dalang atau sponsor dari setiap gerakan mahasiswa UMY selama ini. Hasil kuesioner yang disebar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pendapat Responden tentang Kemungkinan Dalang dalam Pergerakan Mahasiswa UMY

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	4	8 %
2	Setuju	23	46 %
3	Biasa Saja	12	24 %
4	Kurang Setuju	4	8 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	7	14 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 46 % mahasiswa setuju bahwa ada dalang dalam setiap gerakan mahasiswa, termasuk ketika mahasiswa melakukan demonstrasi pada kepemimpinan Presiden Jokowi, dari wawancara penulis dengan responden yang mengapa memilih setuju dengan pernyataan adanya dalang, mereka mengatakan kalau dalang terkadang tidak nyata-nyata memperlihatkan dirinya, tetapi pemberitaannya bernada menghasut. Dalang juga didefinisikan sebuah kepentingan yang mungkin akan memanfaatkan gerakan mahasiswa UMY untuk kepentingan tertentu, seperti politik praktis parpol tertentu atau menginginkan keadaan tertentu dari adanya aksi demonstrasi.

Mahasiswa dengan segala kelebihan dan kekurangannya memang sangat mungkin untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu.

Misalnya dalam konteks ini, gerakan mahasiswa memang bisa didalangi aktor tertentu, meskipun mahasiswa itu sendiri tidak sadar bahwa gerakannya dimanfaatkan orang lain. Media bisa dikonstruksi atau diframing dengan adanya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa UMY tersebut untuk kepentingan tertentu.

Beberapa mahasiswa yang tidak setuju memberikan penjelasan bahwa terlalu jauh mengkaitkan gerakan mahasiswa dengan dalang yang kesannya memanfaatkan mahasiswa, karena sampai saat ini mahasiswa sebenarnya masih murni idealisme mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya yang diujikan adalah tentang kemurnian gerakan mahasiswa UMY tersebut. Maksud dari kemurnian gerakan adalah apakah gerakan mahasiswa di UMY masih murni dari hati nurani mereka atau memang sudah tidak murni lagi atau ada kepentingan di belakangnya. Terkait hal ini, hasil kuesioner menampilkan seperti tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pendapat Responden tentang Kemurnian Pergerakan Mahasiswa UMY

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	5	10 %
2	Setuju	16	32 %
3	Biasa Saja	12	24 %
4	Kurang Setuju	10	20 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	7	14 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 32 % mahasiswa setuju bahwa gerakan mahasiswa masih murni dalam setiap gerakan mahasiswa, termasuk ketika mahasiswa melakukan demonstrasi pada kepemimpinan Presiden Jokowi, dari wawancara penulis dengan responden yang mengapa memilih setuju dengan pernyataan kemurnian gerakan ini karena mereka tidak mengikut keterlibatan Ibu Rahmawati Sukarno Putri, Bapak Jenderal purnawirawan Kivlan Zein dan bapak DR. Ir Bintang Pamungkas, mereka hanya mengenal Ahmad Dani sebagai seniman musik karena lagu lagunya yang diminati anak muda. Ketidaktahuan mereka akan peta politik nasional juga memungkinkan mereka masih menganggap bahwa gerakan mereka masih murni dari hati nurani mahasiswa.

Beberapa mahasiswa juga tidak peduli dengan perpolitikan nasional. Terutama responden yang berasal dari Fakultas Kedokteran tampak lebih tidak peduli, jadi berbeda dari zaman Hariman Siregar pada waktu menggoyang kepemimpinan mantan Presiden Suharto, yang memimpin demonstrasi Universitas Indonesia, malahan dari Fakultas Kedokteran. Sedangkan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, cenderung lebih meminat kuliah keseharian mereka dan berharap cepat lulus dan dapat kerja.

Memang ada sedikit kontroversi dalam hasil ini, diawal responden banyak setuju tentang adanya dalang setiap gerakan mahasiswa, namun juga menjawab banyak yang setuju jika gerakan mahasiswa UMY merupakan gerakan murni. Terkait hal ini, penulis berusaha mendalami komentar yang melatarbelakangi mereka menjawab setuju atau tidak setuju. Hal ini mampu

dijelaskan bahwa gerakan mahasiswa UMY sebenarnya murni gerakan mahasiswa, namun sering dimanfaatkan pihak tertentu dari luar kampus yang kemungkinan tidak disadari oleh gerakan mahasiswa UMY. Karena pihak-pihak tertentu tersebut sebenarnya tidak muncul dalam perencanaan aksi maupun pelaksanaan aksi, namun dari pemberitaan mereka dapat melakukan penggiringan opini yang menyesatkan atas berita dan isu yang diusung gerakan mahasiswa untuk kepentingan tertentu.

Tujuan utama dari pelaksanaan demonstrasi atau gerakan mahasiswa diantaranya adalah upaya mahasiswa untuk menyampaikan kritik atas kebijakan pemerintahan yang ada. Hal ini ditunjukkan bahwa sebelum aksi dilakukan, terdapat agenda rapat terkait dengan isu-isu yang akan dikritik. Diskusi dilakukan untuk mengkaji isu-isu tersebut, termasuk kekurangan atau kelemahan dari kebijakan yang telah dilakukan. Evaluasi dianggap penting untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi agar tidak melenceng dari tujuan negara yaitu berpihak pada masyarakat terutama yang miskin.

Untuk melihat apakah gerakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta benar-benar untuk mengevaluasi pemerintah, maka responden diberi pertanyaan tentang evaluasi ini. Hasil dari kuesioner, penulis sampaikan dalam tabel berikut

Tabel 3.3.
Pendapat Responden tentang Usaha Evaluasi Pemerintahan

dalam Pergerakan Mahasiswa UMY

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	14	28 %
2	Setuju	28	56 %
3	Biasa Saja	4	8 %
4	Kurang Setuju	3	6 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 56 % mahasiswa mengatakan setuju bahkan lebih jauh lagi 28 % mengatakan sangat setuju bahwa pergerakan mahasiswa UMY sebagai bentuk evaluasi terhadap pemerintahan adanya gerakan mahasiswa, termasuk ketika mahasiswa melakukan demonstrasi pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang mengapa memilih setuju dengan pernyataan adanya kritik adalah karena bagian responsif anak muda, bahkan hanya 1 (satu) orang yang mengatakan tidak setuju sama sekali, dengan istilah “emangnya gue pikirin”. Hal ini didukung fakta dari beberapa aksi yang dilakukan mahasiswa UMY adalah terkait dengan kebijakan Jokowi yang dinilai tidak pro-rakyat tetapi pro-investasi asing, seperti penghapusan subsidi BBM dan listrik.

Setelah aksi-aksi yang dilakukan selama ini, kemudian bagaimana dengan pencapaian yang dihasilkan. Pencapaian yang dimaksud adalah imbas atau akibat yang dikarenakan adanya aksi tersebut. Pencapaian dapat berarti tersampainya kritik kepada pemerintah, mampu mempengaruhi kebijakan atau bahkan merubah kebijakan. Pencapaian juga dapat diartikan bahwa ide-ide

mahasiswa dapat tersosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan terdorong kritis kepada kebijakan pemerintah. Pikiran kritis merupakan bagian utama dari gerakan sosial masyarakat untuk melakukan kritik kebijakan sampai melawan kebijakan pemerintah. Terkait hal ini, penulis menguji dengan pertanyaan kepada responden penelitian apakah gerakan mahasiswa UMY sudah mencapai hasil yang memuaskan, penulis sampaikan sebagai berikut

Tabel 3.4.
Pendapat Responden tentang Pencapaian
Gerakan Mahasiswa UMY tahun 2016

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	1	2 %
2	Setuju	3	6 %
3	Biasa Saja	12	24 %
4	Kurang Setuju	23	46 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	11	22 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 46 % mahasiswa yang tidak puas dengan apa yang yang dicapai, tidak melihat adanya kasil yang signifikan atas yang disuarakan mahasiswa bersama ormas-ormas yang menentang. Demonstrasi yang dilakukan dinilai belum mampu memberikan efek merubah kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Demonstrasi masih dinilai sebagai cara mengutarakan pendapat yang bisa saja tidak digubris oleh pemerintah. Dalam kasus demonstrasi 212, responden melihat adanya

keterlibatan Tommy Suharto dan mantan Presiden SBY, sehingga rencana terganggu, lalu menyebut tujuan tidak tercapai.

Gerakan mahasiswa di UMY secara resmi diwadahi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, namun demikian tidak semuanya melalui BEM. Ada juga kelompok tertentu atau bahkan perseorangan yang bergabung ke kelompok lainnya. BEM sebagai wadah resmi setiap pergerakan mahasiswa sebenarnya telah mampu mengakomodasi keinginan mahasiswa untuk melakukan gerakan. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan BEM lebih banyak hadir sebagai wadah dan event organisasi saja, sedangkan pada substansi-substansi serta gerakan yang lebih jauh masih sulit diwujudkan.

Untuk melihat apakah gerakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki wadah, penulis sampaikan sebagai berikut

Tabel 3.5.
Pendapat Responden tentang Kemungkinan Wadah Politik
Pergerakan Mahasiswa UMY

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	4	8 %
2	Setuju	28	56 %
3	Biasa Saja	8	16 %
4	Kurang Setuju	9	18 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	1	2 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa ada 56 % mahasiswa yang setuju bahwa gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa diwadahi oleh BEM

UMY. Hal ini dapat dilihat pada persiapan demonstrasi kebanyakan mahasiswa melihat adanya rapat-rapat persiapan, koordinasi dan konsolidasi, kemudian banyak muncul brosur atau pamflet yang dipersiapkan, tulisan-tulisan provokatif dan ajakan mengikuti aksi demonstrasi. Wadah gerakan mahasiswa sangat diperlukan sebagai identitas dan sebagai tempat menggodok ide pergerakan itu sendiri. Wadah juga sebagai arena kaderisasi berbagai penerus kegiatan mahasiswa, termasuk dalam konteks gerakan mahasiswa.

Meskipun melihat ada dalang yang berada dibalik gerakan mahasiswa UMY, namun responden umumnya tidak setuju apabila agenda demonstrasi tersebut dikaitkan dengan upaya makar oleh pemerintah. Untuk melihat apakah gerakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah masuk dalam kategori makar, penulis sampaikan sebagai berikut

Tabel 3.6.
Pendapat Responden tentang Kemungkinan Makar
Pergerakan Mahasiswa UMY

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	3	6 %
2	Setuju	1	2 %
3	Biasa Saja	8	16 %
4	Kurang Setuju	22	44 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	16	32 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 44 % mahasiswa yang mengatakan kurang setuju dengan tuduhan makar, dari wawancara penulis dengan responden yang mengatakan kurang setuju tersebut karena yang mereka

lihat sesungguhnya gerakan mahasiswa adalah penyampaian aspirasi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dan membela rakyat, bukan gerakan makar seperti yang dituduhkan. Responden memahami makar bukan dilakukan mahasiswa, makar dapat saja dilakukan partai-partai yang tidak memiliki jabatan serta kursi menteri di kabinet yang berusaha makar hanya saja mereka terlindungi sebagai anggota partai politik di parlemen. Makar seharusnya dimiliki kelompok-kelompok kepentingan atau kelompok yang mempunyai kekuatan, sebab kalau makar tidak punya kekuatan yang cukup hanya akan mati konyol.

Gerakan mahasiswa UMY sedikit banyak pasti ada pengaruh dari media-media yang ada, baik media mainstream seperti televisi dan koran maupun media online serta media sosial yang sifatnya lebih provokatif. Media sebagai penyampai informasi tentu sah-sah saja dalam penyampaian berita dan peristiwa. Namun media sebagai provokasi dan pengaruh untuk melakukan sesuatu tentu tidak boleh menjadi pengaruh utama dalam gerakan mahasiswa. Karena gerakan mahasiswa harus lahir dari pemikiran dan kajian akan isu-isu strategis dalam negara dan kebijakan. Gerakan mahasiswa UMY sebenarnya tidak dapat lepas dari pemberitaan yang ada, karena setiap pemberitaan tidak dapat dipisahkan mana yang informasi dan mana yang provokasi atau framing kelompok tertentu. Untuk melihat apakah gerakan mahasiswa di UMY hanya karena pengaruh isu di koran dan televisi, penulis sampaikan sebagai berikut

Tabel 3.7.
Pendapat Responden tentang Kemungkinan Pengaruh Media
dalam Pergerakan Mahasiswa UMY

--	--	--	--

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	6	12 %
2	Setuju	23	46 %
3	Biasa Saja	4	8 %
4	Kurang Setuju	12	24%
5	Tidak Setuju Sama Sekali	5	10 %
	Jumlah		100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa 46 % responden sadar dan mengakui bahwa gerakan mahasiswa yang telah terjadi di UMY dalam pemerintahan Jokowi ini lebih pada pengaruh pemberitaan. Pemberitaan yang gencar dan telah diframing oleh kelompok tertentu terkadang diterima mentah-mentah tanpa pengkajian isu yang lebih mendalam. Dalam banyak kasus mahasiswa sadar kalau mereka dipengaruhi oleh pemeritaan media massa yang berbicara gencar misalkan tentang Jokowi, Ahok, China, reklamasi, naga emas dan lain lain yang bukan disiplin ilmu mereka, sehingga gerakan akan berupa reaktif atau responsif isu daripada gerakan mahasiswa yang argumentatif dan reflektif.

Demonstrasi selama ini memang telah identik dengan dunia mahasiswa, meskipun akhir-akhir ini lebih sering juga dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan tertentu. Mahasiswa sebagai bagian dari civil society dan merupakan kaum intelektual wajib memerankan peran penyeimbang dari sebuah kebijakan suatu negara. Mereka harus berdiri sebagai bagian yang membela rakyat dari penguasa maupun pengusaha.

Demonstrasi atau aksi yang merupakan bagian dari gerakan sosial mahasiswa telah menjadi budaya dari mahasiswa. Sebagai sarana untuk belajar berdemokrasi, belajar menyampaikan pendapat dan belajar untuk berorganisasi. Maka berikut ini disampaikan pertanyaan untuk melihat tanggapan responden terhadap demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa UMY. Tanggapan terhadap maraknya demonstrasi gerakan mahasiswa di UMY, berikut hasilnya:

Tabel 3.8.
Pendapat Responden tentang maraknya Demonstrasi
dalam Pergerakan Mahasiswa UMY

No	Tingkat Jawaban	Responden	%
1	Sangat Setuju	4	8 %
2	Setuju	13	26 %
3	Biasa Saja	20	40 %
4	Kurang Setuju	11	22 %
5	Tidak Setuju Sama Sekali	2	4 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 40 % mahasiswa mengatakan biasa saja dan wajar-wajar saja timbulnya demonstrasi dikalangan mahasiswa. Sebab sejak dulu mahasiswa sudah akrab dengan demo-demo terhadap pemerintah. Dari wawancara penulis dengan responden ada yang mengatakan perasaan mahasiswa yang baru saja tamat sekolah lanjutan baik sekolah umum maupun kejuruan, begitu duduk di bangku perguruan tinggi terasa dunia seakan hanya milik mereka, apalagi dengan semangat yang membara ingin memperjuangkan dan menegakkan kebenaran ditambah dengan kuliah dosen-dosen mereka yang idealis.

Dengan konsep yang tidak terlalu jelas mereka akan mengumandangkan protes demonstrasi dan tawuran kepada pemerintah yang dianggap korup, dekadensi, tidak adil, tidak peduli, biasanya disebabkan kenaikan harga yang juga mereka rasakan di kampus-kampus, semangat mereka tinggi walaupun dengan persiapan yang tidak terlalu matang. Konsep yang kurang matang, kajian isu yang kurang mendalam serta koordinasi dan konsolidasi yang kurang rapi membuat gerakan mahasiswa ini gagal atau tidak mencapai tujuan.

Kampus memang mimbar bebas yang mengawali seorang mahasiswa mengenal kehidupan politik, kendatipun yang bersangkutan bukan jurusan politik, berita di koran yang memelas terasa dengan gampang akan mereka perjuangkan dalam sekejap sehingga dengan begitu mereka terasa menjadi pahlawan. Perasaan yang peka terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik memang perlu, namun perlu juga belajar dari pengalaman-pengalaman pergerakan mahasiswa sebelumnya, apakah sudah dalam jalur pergerakan yang benar. Menjadi pahlawan tidak mudah, perlu perjuangan yang panjang dan mendalam.

Semangat mahasiswa ini ditambah oleh fisik mereka yang masih mantap muda dan tegap serta terampil, selama ini mereka mendengar masyarakat membutuhkan mereka, terutama di kota perkampusan mahasiswa menang menjadi sorotan umum baik formal maupun tidak formal, mereka disebut aktivis. Namun fisik saja dan semangat yang membara saja tidak cukup. Diperlukan langkah-langkah gerakan sosial yang rapi, terkonsep, tidak mudah diombang-

ambing media serta kemampuan berhimpun yang solid untuk membangun kekuatan.

Mahasiswa inilah yang kemudian mempengaruhi para tukang becak, tukang ojeg, ibu kost, ibu kandung mereka, tetangga, pedagang kaki lima, dan *cleaning service* untuk ikut ke dalam demonstrasi mereka sehingga tidak menutup kemungkinan masuknya provokator dari para intel untuk kemudian tuntutan mereka tidak murni lagi dan mengarah kepada kerusuhan. Oleh karena itu sebuah gerakan mahasiswa perlu dijaga kemurniannya baik dari pemikiran maupun dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Intinya gerakan mahasiswa harus mempunyai konsep yang jelas dan konsisten dalam melakukan demonstrasinya.

3.2. Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa UMY dalam melakukan Kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo yang dilakukan BEM UMY adalah suatu kecaman atau tanggapan terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dirasa tidak memenuhi harapan atau mengakibatkan penderitaan rakyat. Sebagai gerakan populis yang memperjuangkan kepentingan banyak orang (mayoritas rakyat), maka kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo dilakukan BEM UMY melalui penyampaian penilaian, keberatan dan tuntutan atas suatu kebijakan yang tidak sesuai memenuhi harapan atau mengakibatkan penderitaan rakyat secara luas. Kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Selanjutnya dalam konteks kritik terhadap pemerintah, kritik harus memuat

unsur evaluasi kebijakan yang dianggap salah, upaya menyampaikan kritik dengan berbagai cara dan upaya memberi solusi.

3.2.1. Evaluasi kebijakan yang dianggap salah atau kurang sesuai

Setiap gerakan mahasiswa selalu berawal dari adanya hal yang tidak benar yang sedang berjalan. Kegelisahan yang didukung dengan fakta-fakta bahwa ada hal yang tidak benar atas kebijakan negara yang mengakibatkan penderitaan rakyat membuat mahasiswa melakukan gerakan. Evaluasi dilakukan sebelum melakukan aksi-aksi dan kritik-kritik sebagai landasan berpikir dan menyampaikan pendapat.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh BEM UMY terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi dilakukan baik secara formal maupun informal. Formal artinya isu kebijakan tersebut sejak awal memang dikaji oleh bagian Kajian Isu Strategis dan Advokasi yang ada. Melalui kliping media, diskusi intensif dan analisis yang mendalam akan didapatkan hasil evaluasi yang siap untuk disuarakan. Sedangkan secara informal, isu tersebut dapat datang dari anggota, dari BEM lain atau dari kelompok lain, kemudian dilakukan diskusi dan akhirnya juga menghasilkan kesimpulan evaluasi kebijakan pemerintahan.

Sebagai mahasiswa yang mempunyai cara berpikir akademik, evaluasi tentunya dilakukan melalui cara-cara yang akademis, mulai dari mengumpulkan data, mengumpulkan pendapat-pendapat ahli, mengumpulkan teori-teori yang mampu mengkaji setiap isu, melakukan analisis, melakukan diskusi dan melakukan penyimpulan. Evaluasi bukan hanya dilakukan untuk melihat kesalahan semata, namun juga dilakukan dalam memberikan kajian

alternatif pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan. Sampai disini kritik yang disertai kajian evaluasi kebijakan akan memberikan justifikasi kesalahan suatu kebijakan dan sekaligus memberikan jalan keluar atau solusi yang dapat diambil pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh BEM UMY terhadap kebijakan pemerintah Jokowi dapat berjalan lama maupun cepat, tergantung jenis isunya. Jika isu-isu tersebut krusial, kajian dilakukan dalam waktu cepat karena alasan semakin cepat akan semakin baik. Biasanya isu-isu yang terkait dengan penderitaan rakyat atas kebijakan tertentu, evaluasi dilakukan dengan cepat, seperti kenaikan BBM atau kenaikan listrik. Untuk kebijakan-kebijakan seperti moneter atau kebijakan fiskal, sifat evaluasinya biasanya lebih lama karena memerlukan kedalaman kajian evaluasi.

Evaluasi juga terkadang dilakukan dengan pihak luar, misalkan pertemuan dengan BEM se DIY atau se-Indonesia atau dengan kelompok lain. Melalui diskusi ilmiah maupun seminar atau workshop evaluasi dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa, baik itu sifatnya per tema maupun multi tema. Kegiatan ini selain untuk melakukan evaluasi, biasanya dilanjutkan dengan perencanaan aksi-aksi bersama yang akan dilakukan. Bagaimanapun bentuknya evaluasi terhadap kebijakan yang tidak sesuai menjadi langkah awal dari adanya kritik kebijakan. Kritik dilakukan karena adanya kesalahan kebijakan, tanpa kesalahan tidak perlu dilakukan kritik.

3.2.2. Upaya menyampaikannya kritik

Upaya menyampaikan kritik dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, seperti seminar, diskusi dan aksi demonstrasi. Gerakan BEM UMY dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi memang sudah dilaksanakan berulang kali, kurang lebih ada 4 kali selama masa pemerintahan Jokowi. Empat kali tersebut tidak hanya murni dilakukan sendiri, namun ada yang bergabung dengan mahasiswa lain atau dengan elemen atau ormas atau kelompok lain. Ada pula yang hanya melakukan aksi perorangan dengan hanya bergabung dengan aliansi yang lain.

Aksi demonstrasi baik dilakukan sebagai bagian anggota BEM se Indonesia maupun BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara mandiri atau bahkan perorangan yang ikut ke Jakarta. Beberapa demo yang disuarakan diantaranya adalah demo tanggal 4 November 2016, mahasiswa terlibat bersama beberapa gelintir tokoh ulama dan partai politik yang menggiring Presiden Jokowi untuk ikut bertanggung jawab karena membela mantan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

Demo tanggal 10 Januari 2017, BEM KM UMY bersama Forum BEM DIY dalam Seruan Aksi "AKSI BELA RAKYAT 10/01". Mahasiswa Yogyakarta Menggugat Rezim Joko Widodo dengan tuntutan: 1) Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; 2) Tolak kenaikan harga Bbm Non Subsidi yang dapat memicu kenaikan harga bahan pokok; 3) Naikan upah buruh dan cabut PP Nomor 78 Tahun 2015; 4) Kembalikan Pendidikan di Indonesia kembali ke Amanat UUD 1945 Pasal 31; 5) Pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di negeri ini dan hentikan sikap

lempar tanggung jawab antar instansi negara. Demonstrasi yang dilakukan BEM UMY maupun perwakilan BEM UMY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9. Aksi Kolektif yang diikuti BEM UMY

No	Tanggal/Lokasi	Nama aksi	Tuntutan	Keterangan
1	20 Oktober 2016 (Jakarta)	2 tahun pemerintahan Jokowi	Pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, program tax amnesty yang juga dinilai tak pro rakyat, penyelesaian kebakaran hutan yang tak selesai-selesai, dan hukuman kebiri yang disebut bukan penyelesaian akar permasalahan.	Bersama BEM se Indonesia
2	4 November 2016 (Jakarta)	Aksi Bela Islam	Presiden jangan lindungi Ahok (penista agama)	Bersama ormas dan ulama
3	2 Desember 2016 (Jakarta)	Aksi Bela Islam III	Lengserkan ahok dan Penguasa harus hukum ahok	Perwakilan Anggota BEM bersama ormas dan ulama
4	10 Januari 2017 (DIY)	Aksi Bela Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016; 2. Tolak kenaikan harga Bbm Non Subsidi yang dapat memicu kenaikan harga bahan pokok; 3. Naikan upah buruh dan cabut PP Nomor 78 Tahun 2015; 4. Kembalikan Pendidikan di Indonesia kembali ke Amanat UUD 1945 Pasal 31; 	Bersama BEM Se DIY

			5. 5) Pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di negeri ini dan hentikan sikap lempar tanggung jawab antar instansi negara.	
5	20 Oktober 2017 (Jakarta)	3 tahun pemerintahan Jokowi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegakkan kembali ekonomi kerayatan. 2. Monolak Keras proyek Kereta Cepat Indonesia Cina sampai terpenuhinya segala bentuk persyaratan hokum dan kepastian financial kepada masyarakat terdampak. 3. Menolak proyek bandara Inernasional Jawa Barat sampai adanya kejelasan alih fungsi pendapatan masyarakat terdampak. 4. Menolak segala bentuk pelemahan pemberantasan pemberantasan korupsi dan penuh hak pengadaan KTP-el bagi warga Negara yang belum mendapatkannya 5. Menolak proyek pembangunan yang melangkahi hak rakyat atas ruang hidup. 	Bersama BEM se Indonesia

Bagi mahasiswa UMY yang sudah pernah mengikuti demonstrasi mempunyai alasan yang beragam mengapa mereka mengikuti demo. Diantara

alasan yang sering disampaikan adalah bahwa demo adalah sebuah tanggungjawab sebagai mahasiswa yang sadar akan perilaku pemerintah yang dzolim dan kebijakan yang yang tidak pro rakyat miskin. Ada yang mempunyai alasan bahwa pemerintah tidak serius menanggapi kasus-kasus besar yang disuarakan, mendorong pemerintah agar kebijakannya berpihak ke rakyat. Ada juga yang melakukan aksi karena ingin belajar berdemokrasi, mengkritik serta menyampaikan pendapat.

Alasan tersebut tidak lepas dari penilaian mereka terhadap pemerintahan Jokowi. Umumnya mereka yang berdemo adalah yang tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang dinilai menyengsarakan rakyat, berpihak kepada asing terutama Cina dan Amerika serta merupakan rezim yang dapat dikatakan otoriter.

“Dalam banyak hal pemerintahan Jokowi bisa dikatakan sedang menuju otoriter. Ini di karenakan ada kesalahpahaman rezim terhadap cara berdemokrasi. Harga minyak bumi yang di lepas ke pasar dunia, sampai perpu ormas yang sebenarnya tidak menguntungkan rakyat bahkan cenderung merugikan” (wawancara korlap aksi, tanggal 25 Agustus 2017)

Perpu Ormas merupakan kebijakan Jokowi yang banyak ditentang kalangan karena dinilai dapat dijadikan sebagai alat politik untuk membubarkan ormas yang menentang pemerintahannya. Perpu ini sangat membahayakan karena apabila tidak dipertanggungjawabkan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan berimbas ke lembaga-lembaga tertentu.

Kritik-kritik yang disampaikan dalam gerakan mahasiswa UMY selain dilakukan dengan demonstrasi, juga dilakukan melalui seminar dan kegiatan diskusi mahasiswa. Seminar pernah dilaksanakan di UMY dengan tema Gejolak Pemerintahan Jokowi-JK, titik fokus utama yaitu pada pemerintahan Jokowi ini harus lepas dari cengkraman Amerika terkhusus pada bidang SDA. Mimbar mahasiswa dan audiensi dengan ketua DPRD juga pernah dilakukan bersama KAMMI terkait kasus kekerasan demonstrasi “411” yang menimpa kepada sebagian mahasiswa dan orang-orang lainnya.

Forum diskusi, aksi dan advokasi telah dilakukan mahasiswa sebagai suatu gerakan untuk menyadarkan peran mahasiswa dalam pembangunan adalah melakukan kontrol kebijakan pemerintah yang dirasa tidak benar. Banyak forum diskusi dengan berbagai tema kebijakan pemerintahan dan inilah yang menjadi penggerak teman-teman aktivis untuk melakukan demonstrasi atau kegiatan gerakan yang lain. Selain itu, diskusi dan demonstrasi mahasiswa juga sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat dan media bahwa kebijakan pemerintah tidak selamanya benar, butuh diberi masukan dan butuh untuk di kritik agar lebih baik.

3.2.3. Upaya memberikan alternatif solusi.

Tuntutan yang disuarakan mahasiswa umumnya kebijakan yang salah harus dihentikan dan diganti dengan kebijakan yang dianggap baik oleh mahasiswa. Solusi atau alternatif yang disampaikan mahasiswa umumnya telah

melalui evaluasi dan kajian yang matang, sehingga solusi alternatif yang ditawarkan dapat diambil oleh penguasa. Penguasa harus diyakinkan melalui data, logika dan fakta atas dampak kebijakan yang salah.

Upaya memberikan alternatif solusi bukan persoalan mudah, karena sebenarnya kebijakan yang dilakukan pemerintah sebenarnya telah melalui kajian untung dan ruginya. Diperlukan kajian yang serius tentang suatu isu. Menyampaikan kritik mudah, tetapi memberi solusi adalah hal yang sulit. Terkadang karena akibat dari suatu kebijakan yang menimbulkan permasalahan serius kritik disampaikan terlebih dahulu, sedangkan solusi dipikirkan kemudian.

Solusi alternatif yang ditawarkan oleh BEM UMY dalam aksi-aksinya atau kegiatan kritiknya disesuaikan dengan tema kritik tersebut. Namun pedoman secara umum solusi harus membela kaum yang lemah dan rakyat yang menderita, solusi harus lebih baik dari kebijakan yang ada, serta solusi harus mudah diimplementasikan. Untuk solusi alternatif kebijakan yang ditawarkan akan dibahas sesuai isu.

3.3. Isu-Isu Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Setiap kebijakan pemerintah Joko Widodo yang sudah berjalan 3 tahun ini ditanggapi secara beragam oleh semua kalangan, tidak semuanya diterima dengan baik, termasuk kalangan mahasiswa yang selalu menyuarakan suara rakyat. Isu-isu kebijakan Joko Widodo banyak yang berbuah kritikan dari demo-demo mahasiswa yang ada diseluruh Indonesia. Kritik merupakan kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik

buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik terhadap pemerintahan Jokowi tentu berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi.

Beberapa isu-isu yang menjadi kritik gerakan mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo dapat dikelompokkan menjadi 4 isu kebijakan sebagai berikut:

1. Isu Kenaikan harga, meliputi kenaikan BBM, harga-harga bahan makanan pokok, kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya kepengurusan kendaraan bermotor, kenaikan iuran BPJS dan lain sebagainya. Logika dari pilihan isu ini terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga-harga tersebut. Kenaikan harga-harga yang ditimbulkan berdampak luas kepana rakyat, terutama rakyat yang miskin dan termarginalkan. Mahasiswa harus terlibat terkait dengan isu-isu kesejahteraan rakyat, karena mahasiswa merupakan bagian dari rakyat yang mampu menyuarakan penderitaan rakyat.
2. Isu Kebijakan luar negeri, meliputi: kebijakan investasi asing yang longgar, masalah impor bahan makanan, masalah Freeport, masalah Palestina, masalah hubungan dengan Cina, dan lain sebagainya. Logika dari pemilihan isu ini antara lain politik luar negeri mencerminkan keberpihakan Indonesia pada isu-isu nasionalisme dan kehormatan negara, liberalisme/ kapitalisme, isu agama serta isu kesejahteraan yang ditimbulkan dari kebijakan luar negeri. Mahasiswa harus terlibat untuk mengontrol kebijakan negara yang mempunyai dampak atas

nasionalisme, keberpihakan negara kepada rakyat serta kebijakan luar negeri yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadirnya mahasiswa harus dapat memberikan kontrol dan suara yang mewakili rakyat.

3. Isu kebijakan fiskal dan moneter, meliputi: tax amnesty, kurs tukar dollar terhadap rupiah masih tinggi, dan lain-lain. Isu fiskal dan moneter secara makro akan mempunyai dampak terhadap kehidupan bernegara, termasuk terkait kesejahteraan secara umum. Mahasiswa terlibat dalam mengkaji dan berdiskusi terkait isu ini. Kajian isu ini banyak dilakukan secara akademis seperti diskusi, seminar, workshop dan kegiatan lain. Sebagai kaum akademisi, mahasiswa harus peka dan aktif untuk mengontrol negara dalam urusan fiskal dan moneter. Hal ini dengan tujuan jangan sampai negara melakukan kebijakan yang akan membawa pada dampak negatif terhadap rakyat dan negaranya.
4. Isu dalam negeri meliputi: isu ketenagakerjaan, iklim investasi, kepegawaian, pembangunan infrastruktur, Perpu Ormas dan lain sebagainya. Kebijakan dalam negeri sering kali mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat, baik yang sifatnya ekonomi, sosial, masalah demokrasi dan masalah konflik antar golongan. Kebijakan dalam negeri harus selalu dikawal untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan alternatif dari suatu keputusan. Mahasiswa sebagai bagian dari civil society harus mampu memberikan suara-suara penyeimbang

yang mampu mengontrol kebijakan negara agar tidak mengakibatkan kerusakan negara dan menyengsarakan rakyat.

3.3.1. Isu Kenaikan harga

Kenaikan harga merupakan isu pertama yang disuarakan para mahasiswa diawal pemerintahan Jokowi. Hal ini dikarenakan langkah berani Jokowi mencabut subsidi BBM dan listrik yang secara berantai menyebabkan inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik. Melihat kebijakan ini, maka mahasiswa UMY melakukan aksi demonstrasi di beberapa tempat untuk menuntut pengembalian subsidi BBM, subsidi listrik serta turunkan kebutuhan pokok. Pemerintah dinilai tidak pro rakyat dengan mencabut subsidi.

Selain BBM dan listrik, kenaikan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan BPJS juga menjadi bahan kritik dan demonstrasi. Pemerintah dianggap mengkhianati rakyat karena rakyat semakin sengsara dengan kenaikan tersebut. Belum lagi kenaikan semua kebutuhan hidup akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM.

Kenaikan BBM karena dicabutnya subsidi oleh pemerintah merupakan isu yang paling krusial dalam isu kenaikan harga karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan inflasi yang akan berdampak pada kenaikan barang dan jasa. Oleh karena itu tuntutan mahasiswa adalah kembalikan subsidi BBM dan kendalikan inflasi serta jaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Argumentasi mereka adalah rakyat akan semakin menderita jika subsidi BBM dihilangkan oleh pemerintah.

3.3.2. Isu Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dari pemerintahan Jokowi memang berbeda dengan jaman SBY. Jokowi lebih tegas dan tidak cenderung cari aman terhadap dunia internasional, terutama Amerika dan lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Sikap ini tentu membuat bangga sebagian besar warga Indonesia karena dirasa negara lebih berwibawa dan mempunyai posisi tawar. Namun kebijakan-kebijakan luar negeri yang lain tidak lepas dari kritik dan demonstrasi dari berbagai golongan, termasuk demonstrasi mahasiswa.

Kebijakan luar negeri Jokowi yang banyak mendapat sorotan dan kritik dari gerakan Mahasiswa, termasuk mahasiswa UMY adalah investasi asing yang longgar, masalah impor bahan makanan, masalah Freeport, masalah Palestina, masalah hubungan dengan Cina, dan lain sebagainya. Terhadap masalah investasi asing, memang Jokowi membuka seluas-luasnya investasi asing terutama untuk infrastruktur dan pengelolaan konektivitas. Hal ini memang bebas, aliran dana dari luar sangat besar. Hal inilah yang dikritik mahasiswa, bahwa jangan terlalu longgar untuk investasi asing, jangan memihak pengusaha asing dan perketat aturan untuk investor asing. Investor yang saat ini dikritik adalah investor dari Cina. Mahasiswa menganggap Jokowi lebih dekat dengan Cina, hal ini dikaitkan dengan ideologi Komunis.

Terkait dengan freeport, kritik mahasiswa seharusnya pemerintah mengusir Freeport dari Indonesia, putra Indonesia sudah mampu

mengerjakan Freeport secara mandiri. Pemerintah diminta tegas, ketika Freeport tidak mau mendirikan Smelter di Indonesia, maka mereka seharusnya diusir dari Indonesia. Pemerintah diminta untuk menjalankan Undang-Undang dengan tegas, jika Freeport tidak mau menuruti hukum Indonesia maka harus dikeluarkan dari Indonesia.

Masalah Palestina, kritik mahasiswa ditujukan kepada pemerintah bahwa pemerintah kurang tegas dan sungguh-sungguh untuk membantu dan membela warga Palestina. Tuntutan mahasiswa adalah boikot produk-produk Israel dan putus hubungan diplomatik dengan Israel karena telah berbuat Dzolim kepada Palestina. Tuntutan ini didasarkan argumentasi pada sikap Israel yang sewenang-wenang terhadap Palestina. Tragedi kemanusiaan warga Palestina diakibatkan oleh Israel.

Terakhir adalah masalah Rohingnya yang pemerintah dituntut untuk ikut membantu penyelesaian konflik serta membantu dengan bantuan kemanusiaan. Tuntutan lain adalah untuk ikut menekan kebijakan politik Myanmar karena dianggap membiarkan dan berada dibalik tragedi kemanusiaan di Rogingnya. Untuk tuntutan ini sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk melakukan berbagai dialog penyelesaian, serta mengirim berbagai bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan, bahkan Rumah Sakit.

Kebijakan Import tentu saja tidak luput dari kritikan, apalagi barang-barang yang di import adalah barang-barang yang sebenarnya ada dalam negeri seperti daging sapi, garam, buah, beras serta bahan-bahan lain.

Tuntutanya adalah penghentian imp[ort dan kuatkan pengusaha dan UMKM dalam negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan barang dalam negeri. Argumentasinya adalah ironis jika Indonesia dengan segala kekayaannya masih import bahan makanan yang sebenarnya Indonesia mampu memenuhinya.

3.3.3. Isu Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Jokowi terkait dengan Isu kebijakan fiskal dan moneter yang mendapat kritikan diantaranya meliputi: tax amnesty, kurs tukar dollar terhadap rupiah masih tinggi, dan inflasi yang tinggi. Kebijakan fiskal lebih ditunjukkan kepada kebijakan dalam penyusunan APBN.

Sebenarnya kebijakan moneter dan fiskal tidak terlalu banyak mendapat kritik dari mahasiswa, karena urusan ini sulit dimengerti oleh mahasiswa dan masyarakat. Kritik lebih banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi dan akademisi atau peneliti atau profesional yang terkait langsung dengan bidang moneter dan fiskal. Meskipun demikian ada beberapa kebijakan yang disinggung dalam orasi atau mimbar akademik oleh mahasiswa UMY. Masalah inflasi yang tinggi dan kebijakan makro ekonomi Jokowi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak kunjung turun. Inflasi seharusnya mampu diatasi oleh pemerintahan Jokowi dengan berbagai kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi penting diatasi karena berkaitan dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.

3.3.4. Isu Kebijakan Dalam Negeri

Selain isu luar negeri, isu dalam negeri juga menjadi bahan kritik dari pemerintahan Jokowi. Diantara isu-isu tersebut adalah isu ketenagakerjaan atau pengangguran, isu kemiskinan, iklim investasi, kepegawaian, pembangunan infrastruktur, Perpu Ormas dan lain sebagainya. Isu yang paling penting dalam negeri diantaranya masalah kemiskinan dan pengangguran akibat kebijakan Jokowi disektor ekonomi dan sektor lain. Pemerintah dituntut oleh gerakan mahasiswa untuk mampu menyediakan lapangan kerja yang luas, sehingga pengangguran berkurang dan angka kemiskinan akan turun.

Pembangunan infrastruktur pada sisi lain didukung, namun sisi yang lain juga dikritik terutama terkait pemodalnya dari asing. Infrastruktur yang dibangun secara masif oleh pemerintahan Jokowi juga dituntut mampu untuk menyerap tenaga kerja yang ada. Pembangunan infrastruktur jangan hanya memenuhi keinginan investor, tetapi unsur kebutuhan rakyat harus diutamakan. Pertumbuhan ekonomi jangan sampai menciptakan ketidakmerataan atau memperbesar kesenjangan ekonomi.

Perpu ormas menjadi isu dalam negeri yang sangat ramai dikritik, karena dikaitkan dengan otoriter sebuah rezim jika disalahgunakan, isu tersebut terkait kepentingan kelompok tertentu. Dari sudut pandang mahasiswa, keberadaan Perpu Ormas dinilai akan mengancam praktek demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini didukung oleh data bahwa tingkat demokrasi di Indonesia turun dari tahun sebelumnya. Mahasiswa menuntut

perpu ini di cabut, pelanggaran yang ada dapat ditindak dengan UU ormas dan undang-undang pidana yang ada.

3.4. Strategi Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa UMY

Dalam konteks gerakan mahasiswa, strategi dalam menyusun sebuah gerakan harus diterapkan untuk mencapai tujuan dari gerakan mahasiswa tersebut. Gerakan mahasiswa ada yang terjadi secara spontanitas dan ada yang terjadi secara permanen atau terus menerus. Maka strategi dalam konteks gerakan mahasiswa Matulesy (2005: 42-47) memiliki ciri antara lain:

1. Gerakan mahasiswa dibawah oleh organisasi, baik kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Gerakan mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda, pada gerakan mahasiswa yang permanen tujuannya mempengaruhi kebijakan, sedangkan yang bersifat temporer bertujuan menekan kebijakan pemerintah dan melakukan perubahan politik.
3. Gerakan mahasiswa dilakukan dengan penuh kesadaran
4. Gerakan mahasiswa memiliki ideologi
5. Gerakan mahasiswa tidak membentuk lembaga resmi seperti parpol, namun lebih pada aksi kolektif untuk mewujudkan gerakan.
6. Dalam menggelar aksi kolektif gerakan mahasiswa menampilkan isu-isu strategis dalam sarana massa memobilisasi dan mengefektifkan aksi

Kritik kebijakan pemerintahan presiden Joko Widodo yang dilakukan mahasiswa memerlukan strategi gerakan untuk memuluskan tujuan dari aksi

pergerakan tersebut. Strategi gerakan mahasiswa merupakan pola atau rencana yang diputuskan dan dikerjakan dengan langkah-langkah yang mengintegrasikan tujuan bersama, perencanaan dan pelaksanaan aksi utama secara sistematis untuk tujuan gerakan mahasiswa. Strategi tersebut akan meningkatkan efektifitas gerakan mahasiswa, mengarahkan serta membuat gerakan menjadi terencana dan terfokus untuk mencapai tujuan, baik tujuan aksi maupun tujuan organisasinya. Selanjutnya gerakan mahasiswa ini akan memberikan kontribusi terhadap konstruksi sosial yang ada.

Dalam konteks gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa UMY, strategi tersebut dapat dilihat dari proses terbentuknya suatu aksi atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UMY. Strategi-strategi tersebut dapat dilihat dari keterangan dibawah ini.

Pertama, gerakan mahasiswa harus mempunyai wadah organisasi baik untuk gerakan jangka pendek maupun jangka panjang. Gerakan mahasiswa umumnya diwadahi oleh BEM, termasuk di UMY diwadahi oleh BEM UMY. Dari wadah ini dapat berinteraksi, berkoordinasi berkonsolidasi dengan BEM yang lain atau ormas-ormas yang lain. Wadah organisasi sangat diperlukan sebagai identitas gerakan serta karakteristik gerakan itu sendiri. Sebagai mahasiswa, maka gerakan mahasiswa UMY tentu berangkat dari keresahan-keresahan yang dirasakan masyarakat atas kebijakan yang dirasa memberatkan. Wadah ini sebagai tempat untuk mendialogkan ide dan strategi gerakan agar gerakan dapat berhasil. Gerakan

yang dilakukan oleh mahasiswa UMY secara wadah telah terpenuhi karena diwadahi oleh BEM UMY.

Kedua, gerakan mahasiswa memiliki tujuan yang berbeda, pada gerakan mahasiswa yang permanen tujuannya mempengaruhi kebijakan, sedangkan yang bersifat temporer bertujuan menekan kebijakan pemerintah dan melakukan perubahan politik. Aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa UMY pada dasarnya ingin menekan pemerintah atau kebijakan pemerintah agar secara politik pemerintah tertekan dan mau meninjau kembali kebijakannya. Untuk aksi-aksi jangka pendek yang dilakukan mahasiswa UMY selama ini memang bertujuan untuk memberikan tekanan politik dan merubah kebijakan yang dianggap salah. Namun selama ini aksi-aksi yang dilakukan belum banyak memberikan dampak terhadap perubahan kebijakan. Memberikan tekanan politik juga masih belum karena hanya dilakukan secara lokal, tetapi jika aksi itu dilakukan di tingkat nasional tekanan politik dapat terjadi karena berhimpun dengan kekuatan yang lain. Secara jangka panjang juga aksi-aksi yang dilakukan gerakan mahasiswa UMY juga belum mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pendapat mereka didengar dan ditampung, namun belum sampai pada tataran mempengaruhi atau merubah kebijakan pemerintah.

Ketiga, gerakan mahasiswa dilakukan dengan penuh kesadaran. Sebagai gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa UMY dilakukan dengan penuh kesadaran, terutama bagi yang melakukan aksi. Maka langkah yang

paling penting adalah dari kreator aksi adalah membentuk kesadaran mahasiswa lain untuk ikut melakukan aksi. Jika aksi dilakukan dengan penuh kesadaran, maka provokasi akan sulit masuk dan aksi berjalan solid dan kompak. Untuk membentuk kesadaran itu, biasanya sebelum aksi diadakan diskusi dan penyebarannya pamflet yang tujuannya memberikan kesadaran pada pembaca untuk menyadari pentingnya isu yang akan diusung sehingga mereka mau mendukung jalannya aksi.

Keempat, gerakan mahasiswa memiliki ideologi. Ideologi merupakan hal penting yang harus menjadi dasar pergerakan. Ideologi pergerakan mahasiswa UMY selama ini masih sangat rapuh. Beberapa mahasiswa yang diwawancarai terhadap ideologi, jawaban mereka masih mengambang dan belum pasti. Ideologi mereka masih belum satu, misalkan ada ideologi membela rakyat, ideologi perubahan, ada ideologi demokrasi dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tergabung dengan organisasi seperti KAMMI dan HMI, maka jawabannya adalah ideologinya organisasi tersebut. Tidak ada yang menjawab ideologi Pancasila. Hal ini menunjukkan ideologi gerakan mahasiswa UMY masih rendah dan belum satu, sehingga akan sulit untuk mewujudkan gerakan yang kuat.

Kelima, gerakan mahasiswa tidak membentuk lembaga resmi seperti parpol, namun lebih pada aksi kolektif untuk mewujudkan gerakan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa UMY yang berkumpul atas nama BEM dan tidak membentuk lembaga resmi karena sifatnya adalah aksi kolektif. Inti dari gerakan adalah terwujudnya gerakan tersebut dan

tujuannya, tidak ada kepentingan praktis seperti parpol yang dibentuk untuk mencari kekuasaan. Gerakan mahasiswa UMY harus dipahami sebagai pengkaderan jiwa aktivis, jiwa pergerakan, keberanian, kecerdasan serta jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kepentingan rakyat.

Keenam, aksi kolektif gerakan mahasiswa menampilkan isu-isu strategis dalam memobilisasi dan mengefektifkan aksi. Isu menjadi hal penting dalam aksi, karena isu yang semakin penting akan berpengaruh pada dukungan masa. Isu-isu strategis merupakan isu yang banyak mendapat perhatian atau isu yang mendasar bagi rakyat serta isu yang mempunyai keterkaitan dengan dampak yang sangat luas. Gerakan mahasiswa UMY dalam memilih isu memang disesuaikan dengan isu yang berkembang dan dirasa strategis. Namun dalam pelaksanaannya, isu-isu yang strategis tersebut masih perlu dikemas dengan menarik, logis dan memiliki dimensi politik yang kuat. Pengelolaan isu menjadi hal yang penting dalam sebuah perencanaan aksi, menganalisis dan memilih serta mencari strategi penyampaian isu merupakan rangkaian yang harus dilewati agar isu dapat menggemakan gerakan mahasiswa.

3.5. Kontribusi Gerakan Mahasiswa UMY terhadap Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Konstruksi sosial menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan interaksi, manusia menciptakan secara terus-menerus suatu

kenyataan yang dimiliki bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara subjektif (Ian, 1997: 53).

Dalam kaitanya dengan gerakan mahasiswa, pada dasarnya gerakan mahasiswa merupakan upaya untuk melakukan konstruksi sosial akan isu-isu yang diusungnya. Gerakan mahasiswa ingin membentuk atau merubah konstruksi sosial yang ada dipeserta aksi, masyarakat, media dan pemerintahan yang dikritiknya. Dengan harapan logika berpikir dan cara pandang mengikutinya, sehingga dimungkinkan dapat merubah kebijakan.

Pada konteks gerakan mahasiswa UMY yang melakukan gerakan dengan mengkritisi kebijakan presiden Joko Widodo. Konstruksi sosial akan kebijakan yang dijalankan Joko Widodo dianggap salah dan harus dikonstruksi ulang untuk mendapatkan konstruksi sosial yang baru yang mampu melawan konstruksi yang lalu. Dengan diterimanya konstruksi tersebut, maka gerakan akan mendapat dukungan dari peserta aksi, masyarakat, media dan bahkan dapat mempengaruhi kebijakan yang ada.

Gerakan mahasiswa bagaimanapun bentuknya, sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap konstruksi sosial yang ada. Gerakan BEM UMY sedikit banyak mempunyai kontribusi terhadap konstruksi sosial yang ada. Adanya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan BEM UMY baik di level lokal maupun level nasional memberikan kontribusi bahwa apa yang dilakukan pemerintah dapat dipandang secara berbeda dari yang dikonstruksikan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dikritik apabila tidak sesuai dengan kepentingan rakyat secara umum, apabila

menguntungkan golongan tertentu dan apabila dapat menyebabkan penderitaan rakyat.

Gerakan BEM UMY dapat memberikan wacana konseptual dan operasional yang mampu mensosialisasikan isu-isu yang diusungnya. Pandangan-pandangan alternatif terhadap isu mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, peserta aksi dan media bahwa gerakan BEM UMY mempunyai konstruksi sosial yang seperti ini terhadap kebijakan pemerintah Jokowi.

Pada akhirnya konstruksi sosial yang berusaha dibentuk oleh gerakan mahasiswa akan diadu secara wacana, secara ilmiah dan secara praktis, mana yang lebih dominan apakah konstruksi sosial yang di usung oleh mahasiswa, atau yang dilakukan pemerintah atau konstruksi yang lain. Pergulatan wacana itu sendiri memberikan ruang dalam perkembangan konstruksi sosial yang ada. Sehingga sedikit banyak gerakan BEM UMY telah mampu memberikan konstruksi sosial berupa wacana cara berpikir alternatif bagi kebijakan Jokowi. Konstruksi sosial yang muncul kemudian gerakan BEM UMY berusaha dan mengupayakan membangun kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi agar lebih baik dan tidak menyengsarakan rakyat.

Gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh BEM UMY dapat menjadi kontribusi atas revitalisasi gerakan mahasiswa hari ini dan kedepan. Revitalisasi terjadi pada bentuk gerakan, isu-isu yang diusung serta model-model gerakan yang merupakan pengembangan dari gerakan mahasiswa

jaman dahulu. Kontribusi positif ini mengikuti perkembangan jaman yang lebih terbuka dan peran mahasiswa saat ini.